

SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI PELABUHAN ANDI MATTALATTA
GARONGKONG KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diusulkan oleh

Jum Harianto Fatman
Nomor Stambuk : 105641106616



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI PELABUHAN ANDI MATTALATTA
GARONGKONG KABUPATEN BARRU**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

Jum Harianto Fatman

Nomor Stambuk : 105641106616

15/03/2021

1 esp
Smb. Alumni

P/0017/IPM/21ca

FAT

c¹

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa : Jum Harianto Fatman
Nomor Stambuk : 105641106616
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM: 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0156/FSP/A.3-III/II/42/2021, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa, 23 Februari 2021.




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua) ()
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si ()
4. Nur Khaerah, S.IP, , M.IP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jum Harianto Fatman

Nomor Induk Mahasiswa : 105641106616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

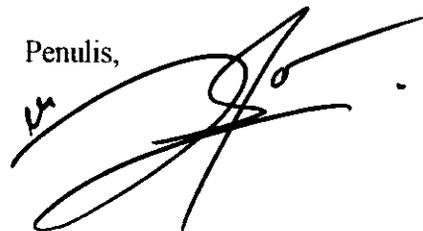
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul : *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, maka gelar yang di peroleh Skripsi ini karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Februari 2021

Penulis,



Jum Harianto Fatman

ABSTRAK

JUM HARIANTO FATMAN.2020 *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru (Dibimbing oleh Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd dan Nur Khaerah, S.IP., M.IP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, kemudian memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dan studi lapang. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model intraktif, Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian menemukan bahwa pengujian a. tahapan dari model *collaborative governance* meliputi empat bagian yaitu 1. Kondisi awal, mediasi dengan menggunakan pendekatan emosional oleh lurah Mangempang. 2. Proses kelembagaan, terdapat ada perbedaan pendapat dari kesepakatan awal yang disepakati. 3. Kepemimpinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru belum menguasai sepenuhnya pengelolaan aktifitas kepelabuhanan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. 4. Proses kolaborasi, semua pihak diawal sampai berjalannya kolaborasi bekerja dengan baik namun belum maksimal. b. Faktor pendukung 1. Kesepakatan Procedural, kolaborasi berjalan lancar karna menjaga kesepakatan dan komitmen bersama pada awal kolaborasi. 2. Intitusi, semua *stakeholders* terkhusus pemerintah yang terlibat bekerja sebagaimana mestinya namun masih perlu ditingkatkan. 3 Pengetahuan sumber daya manusia, sangat mendukung kolaborasi namun di tingkatan masyarakat masih di tenaga jasa. Faktor penghambat 1. Budaya, pemerintah yang masih cenderung berorientasi kepada hasil namun kurang di wilayah monitoring dan evaluasi di pelabuhan garongkong. 2. Politik, pemerintah belum konsisten dalam kesepakatan yang telah disepakati.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Pembangunan Berkelanjutan, Pelabuhan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Segala bentuk pujian hanya milik Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Collaborative Governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua penulis yang tercinta, Abd Rahman dan Hj, Fatmawati, S.Pd Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada hingga kepersembahkan karya ini untuk Bapak dan Mama yang telah memberikan kasih sayangnya dan motivasinya sehingga skripsi ini selesai dengan baik di waktu yang tepat.
2. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I (satu) dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik di waktu yang tepat.
3. Kepala Kelurahan Mangempang, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Barru dan Jajarannya, serta masyarakat Garongkong yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
6. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.

7. Terima kasih untuk Andi Arisma AT yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya disegala kondisi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya di waktu yang tepat.
8. Terima kasih untuk Muh. Fizah Rizwanto sahabat sekaligus saudara penulis yang senantiasa menjadi *best friend* sewaktu masih maba sampai selesai dari kampus Unismuh Makassar.
9. Teman-teman kelas IP B yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi mendekati kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Februari 2021



JUM HARIANTO FATMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II . TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori <i>Collaborative Governance</i>	12
C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	24
D. Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong.....	28
E. Kerangka Pikir.....	36
F. Fokus Penelitian	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
BAB III . METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40

B. Jenis dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	44
H. Triangulasi Waktu.....	45
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Barru.....	47
B. <i>Collaborative governance</i> dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru	60
1. Kondisi Awal	61
2. Bentuk Kelembagaan.....	64
3. Kepemimpinan	65
4. Proses Kolaborasi	68
C. Faktor penghambat dan faktor pendukung <i>collaborative governance</i>	71
1. Faktor penghambat.....	71
2. Faktor pendukung.....	71
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
Table 3.1 . Informan Penelitian	42
Table 4.1. Pembagian Luas Administrasi Kabupaten Barru.....	50
Table 4.2 . Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Barru	51
Table 4.3. Tata Guna Lahan Kabupaten Barru	52
Table 4.4. Matrix Penelitian	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Bangan Kerangka Pikir	36
Gambar 2 . Peta Kabupaten Barru.....	49
Gambar 3 . Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barru.....	58
Gambar 4 . Gambar 4 . Jalur koordinasi dalam kolaborasi di Pelabuhan Garongkong	86
Gambar 4 . Kondisi Infrastruktur, dan Aksesoris Pelabuhan	86
Gambar 5 . Wawancara dengan Informan.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Luas lautan dunia lebih luas dari daratan sekitar tujuh puluh berbanding tiga puluh, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk meningkatkan transportasi lautnya. Pengembangan transportasi laut dunia saat ini sangat meningkat, transportasi laut memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi antara lain daya angkut banyak, dan biaya relatif murah. Pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat memberi pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Sudaryadi, 2007).

Indonesia secara geografis merupakan negara maritim dengan dua pertiga luas lautan lebih besar dari pada daratan. Luas laut Indonesia 3,25 juta km² Kepulauan Indonesia membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling bumi, dengan garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (\pm 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2017)

Pemanfaatan laut sebagai jalur transportasi sudah ada sejak dahulu. Di Sulawesi Selatan nenek orang bugis sudah moyang memanfaatkan laut untuk menunjang kehidupan serta sebagai jalur untuk memperluas daerah kekuasaan. Pada saat awal kemerdekaan Indonesia, pejuang seperti Andi Mattalatta (pahlawan dari Sulawesi Selatan) dalam perjuangannya melawan penjajahan banyak menggunakan transportasi laut, seperti pada saat pendaratan pasukan Batalyon D di Garongkong Kabupaten Barru, merupakan Bataliyon yang dipimpin langsung oleh Komandan Mayor Andi Mattalatta yang berkedudukan di Jawa Tengah (Mattalatta,2014).

Kabupaten Barru merupakan kabupaten yang berdiri pada tanggal 20 Februari 1960 dengan luas daerah luas yaitu 1.174,71 km². Terdapat 7 kecamatan yang sebagian besar dari kecamatan tersebut merupakan pegunungan dengan pantai. Panjang garis pantai mencapai angka 87 km. Panjang garis pantai tersebut membuat Kabupaten Barru menjadi pemilik pantai terpanjang di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain memiliki luas pantai terpanjang di Provinsi Sulawesi Selatan, keunggulan lain yang dimiliki Kabupaten Barru yaitu kedalaman laut mencapai 15-25 meter di laut bagian Garongkong (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

Potensi kelautan Garongkong dapat dikelola menjadi sebuah pelabuhan sehingga pada tahun 2008 terdapat wacana pemerintah daerah

Kabupaten Barru untuk membuat sebuah pelabuhan dan kemudian disahkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan melalui peraturan daerah Sulawesi Selatan no. 9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru dalam perda tersebut berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perda tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Barru dalam hal ini Lingkungan Garongkong akan dibangun sebuah pelabuhan sesuai dengan sistem jaringan transportasi laut nasional. Sehingga ditahun 2008 sampai 2013 telah dilakukan pembangunan tahap pertama.

Keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dari beberapa kriteria yaitu kriteria, ekonomis, bermanfaat secara sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Muksin, 2009). Ketiga kriteria ini merupakan hal penting karna ketiga kriteria ini saling berinambungan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, lingkungan menjadi penting dalam menunjang pembangunan berkelanjutan karna akan mempengaruhi kriteria pembangunan berkelanjutan lainnya. Pentingnya merawat lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dijelaskan secara umum oleh (Brundlandt, 2001) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang.

Keberhasilan pembangunan dari segi ekonomi, dan tarap sosial adalah sebuah kebanggaan bagi sebahagian orang disekitar wilayah pembangunan

Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong. Namun pembangunan tidak selamanya mempunyai dampak yang sesuai harapan. Terbukti sejak adanya pelabuhan terjadi *erosi* tanah di lingkungan warga sekitar pelabuhan. Pengikisan tanah ini tidak terlepas dari infrastruktur pelabuhan yang dibangun di dasar laut dan lokasi pembangunan pelabuhan yang memiliki luas 400 hektar tersebut, sehingga mengakibatkan arus ombak berubah. Maka dari itu peneliti menganggap penting, karna untuk mengetahui bentuk kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Definisi *collaborative governance* menurut (Ansell dan Gash, 2007) adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi *consensus*, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Collaborative governance idealnya adalah melibatkan semua *stakeholders* supaya tercipta pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar kelayakan keselamatan pelayaran. Pelabuhan garongkong diawal pembangunan sudah memperlihatkan kemajuan yang sangat baik. Namun dibeberapa tahun terakhir nampak infrastruktur pelabuhan tidak terawat, yang mengakibatkan turunya kualitas pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan

Andi Mattalatta Garongkong. Hal ini disebabkan tidak baiknya proses komunikasi antara pihak Pemerintah Daerah dengan pihak pelaksana tugas kepelabuhanan dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tentu mengganggu proses kepemimpinan dan mengganggu pula pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Garongkong.. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan sekaligus mendeskripsikan implementasi model *collaborative governance* menurut ansell dan gash, dalam (Ulfa, 2018) diantaranya yaitu kondisi awal, bentuk kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka judul srikripsi penelitian yaitu ***collaborative governance dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tahapan *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tahapan *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini tentunya untuk memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pelaksanaan *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian dibidang pemerintahan di masa yang akan data

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat lebih memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Haryono, 2019) menemukan bahwa Keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka *egalitarianisme* dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan *society*. Hal ini sama dengan penelitian yang saya lakukan karna cita-cita awal pembangunan Pelabuhan Andi Mattalatta Garungkong ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Adapun perbedaan dari konsep penelitian dari (Haryono, 2019) fokus meneliti secara umum jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik, sedangkan saya secara khusus dilingkup kepelabuhanan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Febrian, 2016) tentang *collaborative governance* yaitu menemukan bahwa dalam kolaborasi dari tiga

stakeholders peran *leader* sebagai penggerak *collaborative governance* sangat diperlukan. Hal ini kemudian sama dengan penelitian yang saya lakukan karna dalam *collaborative governance* di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong ini peran *leader* dalam hal ini pihak dari pemerintah Kabupaten Barru sangat diperlukan untuk mengotrol jalannya kebijakan. Kemudian perbedaan mendasar dari penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Febrian, 2016) adalah khusus untuk kawasan pedesaan sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih fokus di wilayah kepelabuhanan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2016) yaitu tentang pengembangan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, menemukan hasil bahwa pengembangan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperluas pembangunan infrastrukturnya. Hasil yang ditemukan oleh (Putra, 2016) kemudian sama dengan apa yang saya teliti dalam hal konsep pengembangan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun perbedaan mendasar dengan penelitian saya adalah cakupan penilitian saya. Penelitian yang dilakukan (Putra, 2016) cakupan lebih luas sedangkan saya skala kabupaten kota.

Berikut beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitian:

Table 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haryono, 2019	Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik	<p>Menemukan hasil bahwa kolaborasi antara <i>government</i>, <i>civil society</i>, dan <i>private sector</i> merupakan langkah-langkah optimalisasi peran <i>government</i> dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintahan kolaborasi merupakan langkah tatanan pemerintahan abad 21. Melalui tatanan pemerintahan <i>new public governance</i> dimana didalamnya memfokuskan pada lima prinsip diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>social-political governance</i> b. <i>public policy governance</i> c. <i>administrative governance</i> d. <i>contract governance</i> e. <i>network governance</i>. <p>Keterlibatan semua pihak antara <i>government</i>, <i>civil society</i>, dan <i>private sector</i></p>

			<p>dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitariansime dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan <i>society</i>. Jadi puncak dari kolaborasi yang dipaparkan Haryono adalah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini cocok untuk diterapkan diindonesia karna puncak daripemerintahan ada pada kuasa rakyat. Kemudian pembangunan apapun yang akan dilaksanakan akan berdampak baik ketika kepentingan rakyat yang dikedepankan.</p>
2	Febrian, 2016	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan</p>	<p>Menemukan bahwa <i>Collaborative Governance</i> sebagai basis pembangunan kawasan perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan. Potensi untuk memajukan desa denganmengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah</p>

			<p>Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan kepentingan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga capaian pembangunan kawasan perdesaan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dapat terwujud dengan baik. Artinya bahwa peran partisipatif dalam <i>Collaborative Governance</i> untuk pendekatan pembangunan dianggap efektif dalam kebijakan pembangun. Peran <i>leader</i> sebagai penggerak <i>Collaborative Governance</i> sangat diperlukan.</p>
3	Putra, 2016	<p>Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung</p>	<p>Menemukan hasil bahwa kinerja operasional pelayanan di pelabuhan dan fasilitas dermaga dan lapangan penumpukan pada umumnya kritis untuk menghadapi pertumbuhan lalu lintas angkutan laut untuk</p>

		Pembangunan Berkelanjutan	periode 5 tahun mendatang. Kemudian strategi pengembangannya adalah perluasan pembangunan infrastruktur pelabuhan, jadi untuk mengembangkan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperluas pembangunan infrastrukturnya.
--	--	---------------------------	---

B. Tinjauan Teori / Konsep Penelitian

1. Definisi *collaborative governance*

Strategi baru *governance* dalam dua dekade terakhir, yaitu *collaborative governance* yang muncul sebagai gaya baru untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. *Collaborative governance* merupakan bentuk baru dari *governance* yang muncul sebagai strategi baru dalam memerintah dengan mengikut sertakan *stakeholders* seperti aktor swasta atau *privat* dan aktor pemerintah tetap menjadi aktor final dalam pengambilan keputusan (Ansell, 2007).

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Ansell dan Gash, 2007) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi consensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau

mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelolah program atau asset publik.

Secara umum pengertian *collaborative governance* oleh (Hartman, C., et al, 2002) adalah merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing- masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

Proses *collaborative governance* idealnya dilakukan bersama semua *stakeholders* yang ada dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dikatakan oleh (Emerson, 2001) mengatakan bahwa proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang- orang secara konstruktif pada batas- batas lembaga publik, tingkat pemerintah, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dilakukan satu pihak.

Collaborative governance menjadi penting dalam tata kelola pemerintahan, karna melibatkan banyak aktor baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangkah mempermudah pemberian pelayanan publik dan penyediaan serta pengelolaan asset publik.

2. Tahapan *collaborative governance*

Pengertian konsep *collaborative governance* menurut (Ansell, 2007)

didasarkan pada enam kriteria , diantaranya :

- a. Bentuk kolaborasi di inisiasi oleh agen publik/ aktor pemerintah
- b. Aktor non pemerintah termasuk salah satu aktor yang terlibat
- c. Aktor pemerintah dan non-pemerintah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan consensus
- d. Kolaborasi dibentuk secara formal dan secara bersama
- e. Kolaborasi dilakukan untuk mencapai konsensus, sekalipun konsensus tidak dicapai dalam perakteknya
- f. Kolaborasi berfokus pada isu kebijakan publik.

Kolaborasi pemerintah yaitu tata kelola pemerintahan yang melibatkan banyak aktor baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik dan penyediaan serta pengelolaan asset publik. Kolaborasi pemerintah muncul sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang semakin kompleks dan bersifat independen, serta rendahnya SDM yang dimiliki pemerintah dan tingginya biaya penerapan suatu program. Keterlibatan pihak lain dari sektor swasta dan NGO menjadi unsur penting dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik.

Pendapat yang dikemukakan oleh Freeman dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan bahwa para *stakeholder* harus terlibat dalam segala tahapan proses pembuatan keputusan, walaupun otoritas tertinggi terletak pada aktor publik, tetapi semua *stakeholders* memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil kebijakan. Karna tujuan dari kolaborasi adalah mencapai tingkat kesepakatan antara *stakeholders*. Connick dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan kolaborasi yaitu salah satu pemecahan masalah yang melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat. Lanjut *collaborative governance* juga didefinisikan sebagai proses untuk menetapkan, mengarahkan, memfasilitasi, dan mengawasi rencana organisasi sektoral dalam menangani permasalahan kebijakan publik yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu organisasi saja.

Semua *stakeholders* harus bekerja sama karna ketika pemerintah sudah memerintah secara kolaborasi, maka akan membawa sistem tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak untuk menghindari tingginya biaya penyediaan pelayanan publik, memperluas partisipasi demokrasi, dan mengembalikan rasionalitas ke dalam manajemen publik. *collaborative governance* muncul sebagai pendekatan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh publik.

Bentuk model pemerintahan kolaboratif menurut (Ansell dan Gash, 2007) memiliki manfaat yang dapat digunakan bagi pembuatan kebijakan dan

praktis. Model kolaborasi ini akan memberikan penjelasan terhadap langkah-langkah pemerintah melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* yang ada, tentang bagaimana pemerintah memperoleh sebuah kebijakan.

- a. Apakah pemerintah melakukan negosiasi secara baik ?
- b. apakah para *stakeholders* melakukan kerja sama tersebut atas dasar kepentingan bersama ?

- c. apakah *stakeholders* terlibat mencapai consensus selama proses kolaborasi

Ada banyak bentuk model dalam proses kolaborasi pemerintahan, namun fokus penelitian penulis yaitu memberikan gambaran mengenai bentuk kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. Adapun tahapan yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu teori dari Ansell dan Gash dalam (Ulfa, 2018). ini memiliki empat *variable* tahapan dalam kalaborasi yaitu:

- a. Kondisi awal
- b. Bentuk Kelembagaan
- c. Kepemimpinan
- d. Proses Kolaborasi

Kondisi awal, adalah proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dengan membicarakan atau berdiskusi mengenai potensi yang ada didaerah yang terkena dampak pembangunan, dan mengharuskan semua pihak melakukan kolaborasi.

Bentuk kelembagaan, adalah proses melibatkan banyak aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik dan penyediaan serta pengelolaan asset publik.

Kepemimpinan, merupakan cara mengelolah, mengatur, mengendalikan keputusan urusan yang berkaitan dengan urusan publik .

Proses kolaborasi, adalah proses pengerjaan yang melibatkan semua stakeholders dalam semua tahap proses pembuatan keputusan.

Hal terpenting dari keempat tahapan model ini adalah proses kolaborasi, variable yang lain hanya merupakan variable pendukung. Bentuk *collaborative governance* menurut (Mutiara, 2017) *collaborative governance* bisa berjalan melalui kontrak- kontrak formal atau *collaborative relationships* bisa berjalan melalui kesepakatan formal maupun informal tergantung dari isu yang dihadapi. Namun kesepakatan informal cenderung lebih sulit untuk menganalisis.

3. Faktor yang mempengaruhi *collaborative governance*

Emerson dan Nabatchi dalam (Ulfa, 2018) menyatakan bahwa suksesnya kolaborasi merupakan kemampuan bertindak secara kolektif. Yang menggambarkan kerangka kolaborasi sebagai bagian yang krusial dan dinamika kolaborasi dan membutuhkan dukungan secara berkelanjutan dari

berbagai aktor dalam collaborative governance. Kemampuan bersama ini meliputi kesepakatan procedural, institusional, pengetahuan sumber daya manusia dan kepemimpinan.

Kesepakatan procedural ialah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari satu pihak ke pihak yang lain. Pelaku kesepakatan tersebut sebagai pembujuk yang ulung karna mampu membuat orang lain yang menjadi target berkata iya untuk kesepakatan yang ditawarkan para pelaku kesepakatan tersebut antara lain pelobi politik, politisi, negosiator profesional, dan lain-lain.

Institusional bisa mempengaruhi kolaborasi apabila pihak yang berkepentingan melakukan koordinasi secara terbuka dan menerima segala aspirasi masyarakat di awal kolaborasi sampai proses kolaborasi berjalan.

Pengetahuan sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses kolaborasi dikarnakan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus menguasai secara maksimal bidang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga kolaborasi bisa berjalan secara maksimal

Kepemimpinan menjadi hal central dalam kolaborasi karna pemimpinlah yang menjadi pengatur, insiator dalam mengelolah, mengatur jalannya kolaborasi.

Freeman dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan bahwa para *stakeholder* harus terlibat dalam segala tahapan proses pembuatan keputusan,

walaupun otoritas tertinggi terletak pada aktor publik, tetapi semua *stakeholders* memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil kebijakan. Karna tujuan dari kolaborasi adalah mencapai tingkat kesepakatan antara *stakeholders*. Jadi kesepakatan adalah faktor penting yang mempengaruhi *collaborative governance*.

Collaborative governance tidak akan berjalan dengan baik ketika salah satu dari *stakeholders* atau aktor publik tidak bekerja sama dengan baik. seperti yang dikatakan Connick dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan kolaborasi yaitu salah satu pemecahan masalah yang melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat. Lanjut *collaborative governance* juga didefinisikan sebagai proses untuk menetapkan, mengarahkan, memfasilitasi, dan mengawasi rencana organisasi sektoral dalam menangani permasalahan kebijakan publik yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu organisasi saja.

Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan semua *stakeholders* dalam menentukan, mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Hal-hal penting dalam menjalankan *collaborative governance* tersebut digambarkan oleh Donahue dalam (Sudarmo, 2011) yang memberikan tiga aspek dalam memulai inisiatif *collaborative governance* antara lain sebagai berikut :

- a. Inisiatif pasti bermula dari pemain atau pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar.

- b. Masing- masing *stakeholders* atau istitusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan- tujuan kolaborasi.
- c. Hubungan diantara institusi- institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya setiap intitusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut.

Dalam kolaborasi tentu ada beberapa hal yang menghambat kolaborasi, faktor yang menghambat kolaborasi *Collaborative governance* menurut Governmentof (Canada, 2008) dan (Sudarmo, 2011) adalah karena disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor-faktor budaya, faktor-faktor institusi-institusi dan faktor-faktor politik.

- a. Budaya

Terkait dengan faktor budaya bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko. Untuk menciptakan kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayanan publik dan dengan demikian para pemimpinnya untuk memiliki *skills* keterampilan dan kesediaan untuk masuk ke kemitraan secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Memang memungkinkan mengabaikan *konvensi* dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam sebuah kolaborasi, namun melakukan hal seperti ini dalam pelayanan publik yang tergantung terhadap prosedur secara berlebihan justru akan menghambat

kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Dengan kata lain, ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas kolaborasi.

Disamping itu, mengapa kolaborasi gagal karena masih dipertahankannya pendekatan *top down* oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi, kolaborasi juga gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau *stakeholder* lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan/pihak pemerintah melalui pendekatan *top down* (Sudarmo, 2009). Kolaborasi juga bisa gagal karena kooptasi dan strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah (Sudarmo, 2009).

b. Institusi-institusi

Terkait faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan instansi-instansi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi terutama dari pihak pemerintah cenderung menerapkan struktur hirarkis

terhadap institusi-institusi lain yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur *vertical*, yang dengan demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat *vertical*, tidak cocok untuk kolaborasi karena kolaborasi masyarakat cara-cara kerja atau pengorganisasian secara *horizontal* antara pemerintah dan non pemerintah. Bahkan betapapun sebuah pemerintah mengadopsi sistem pemerintah demokrasi yang biasanya bersifat *representative democracy* belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi mensyaratkan tingkat proses dan derajat *formalism* yang begitu besar dibanding dengan kemitraan *horizontal*. Dengan kata lain, kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas yang kadang tidak memerlukan aturan ketat secara formal dan kadang juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang bisa dilakukan dalam keseharian, atau sesuai standar *operating procedure* yang bisa terjadi dalam organisasi publik yang mekanistik, tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang di tentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan negara demokratis pada umumnya. Akuntabilitas institusi-institusi publik organisasi-organisasi milik pemerintah cenderung kaku, yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi atau atasan saja, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam konteks ini lebih menekankan pada *responsibilitas*.

c. Politik

Terkait dengan faktor politik, kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif *forward-looking* adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikn inspirasi terhadap agenda yang ditentukan diatas tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif. Untuk menggaris bawahi bahwa kolaborasi bisa saja terlambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik satu sama lain. Melalui kolaborasi ini konflik tujuan yang sering terpresentasikan sebagai tujuan masing-masing kelompok kepentingan bisa diminimalisir.

Faktor yang lain yang bisa menjadi gagalnya sebuah kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antara *stakeholder* yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara *stakeholder* termasuk para pemimpin masing-masing kelompok (Sudarmo, 2009).

C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

1. Defnisi pembangunan berkelanjutan

Sejarah dari konsep pembangunan berkelanjutan berawal dari penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran untuk menaikkan kemakmuran rakyat (ekonomi) namun tanpa memperhatikan penggunaan sumber daya alam dan teknologi canggih yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Terdapat instansi yang menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada tahun 1988, yaitu *Brundtland Commission* (Litman, 2011). Prinsip tersebut dibawa dalam *Intergovernmental Panel on Climate Change* tahun 1988, namun baru ditetapkan tahun 1992 atau empat tahun berikutnya di Rio de Janeiro terkait dengan perubahan iklim. Deklarasi tersebut membahas pembaharuan ekonomi sampai dengan pengkajian pengaruh lingkungan.

Kesepakatan berikutnya muncul pada tahun 1997, yaitu tahun 2001 di Marrakesh Accord. Rangkaian kesepakatan antar negara tersebut menunjukkan penggunaan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang digunakan di masing-masing negara yang sepakat tidak berubah banyak namun menggunakan penjelasan rinci yang berbeda. membahas pembaharuan ekonomi sampai dengan pengkajian pengaruh lingkungan. Kesepakatan berikutnya muncul pada tahun 1997, yaitu Protokol Kyoto dan tahun 2001 di Marrakesh Accord. Rangkaian kesepakatan antarnegara tersebut menunjukkan penggunaan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang digunakan di masing-masing negara yang

sepakat tidak berubah banyak namun menggunakan penjelasan rinci yang berbeda (Lawalata, 2013).

Pembangunan dapat disebut berkelanjutan apabila memenuhi kriteria, ekonomis, bermanfaat secara sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Muksin, 2009). Kemudian secara umum definisi pembangunan berkelanjutan dijelaskan oleh (Brundlandt, 2001) yang menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang. Pembangunan berkelanjutan mengusahakan pemenuhan kebutuhan manusia saat ini terpenuhi baik itu mengenai ekonomi, kebutuhan social maupun kebutuhan yang terkait mengenai lingkungan.

Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Brundlandt tersebut tidak lain untuk mencegah punahnya sumber produksi. Karna sumber produksi atau SDA cenderung di manfaatkan secara berlebihan seperti yang dikatakan oleh (Mukhli, 2009) Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu isu penting dalam proses pembangunan dewasa ini. Segenap faktor produksi (*resources*) yang dimiliki negara akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam pencapaian target pembangunannya, artinya ada kecenderungan untuk mengeksploitasi secara berlebihan dan hal tersebut tentu tidak dibenarkan dalam teori pembangunan berkelanjutan.

2. Indikator pembangunan berkelanjutan

Salah satu penjelasan tentang indikator pembangunan berkelanjutan menurut KLH dalam (Rahadian, 2016) adalah pembangunan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

- a. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*.
- b. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.
- c. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep diatas, (Sutamihardja, 2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan

ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan menurut (Sutamihardja, 2004), menggambarkan bahwa tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat

untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan seharusnya perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya.

D. Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong

1. Pelabuhan

Menurut (Gurning dan Budiyanto, 2007) pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan layanan jasa. Pada umumnya pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau membongkar memuat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Serupa dengan yang dikatakan sebelumnya definisi pelabuhan menurut (Suranto, 2004) adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat

barangyang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan dan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

Pengertian pelabuhan secara spesifik disampaikan (Jinca, 2011) mengatakan bahwa pelabuhan laut yaitu suatu daerah perairan yang terlindung terhadap badai, ombak dan arus, sehingga kapal dapat mengadakan olah gerak bersandar, muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat terlaksana dengan baik. fungsi utama dari pelabuhan laut adalah fungsi perpindahann muatan dan fungsi industri dilihat dari sudut pengusaha pelabuhan melengkapi fasilitas- fasilitas terhadap keperluan kegiatan kapal di pelabuhan, antara lain alur pelayaran untuk keluar masuk kapal dari dan kepelabuhan, peralatan tambat, kegiatan bongkar muat dermaga, pengecekan barang, pergudangan, penyediaan jaringan transportasi local dikawasan pelabuhan.

a. Konsep Peraturan Daerah Tentang Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong

Keberadaan pelabuhan di Garongkong Kabupaten Barru tidak terlepas dari adanya regulasi pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Perda no.9 tahun 2009 secara umum mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Lahirnya perda no.9 tahun 2009 merujuk pada UU no. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, UU no.17 tahun peyaran, Keputusan

Menteri Perhubungan no. 56 tahun 2003 tentang klasifikasi pelabuhan Perda Sulawesi Selatan no.9 tahun 2009 tentang RTRW Pasal 17 (B) tentang sistem jaringan transportasi nasional laut, kemudian Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong secara sistem disebutkan secara spesifik sebagai sistem penyeberangan laut pada pasal 20 (C) tentang jaringan penyeberangan lintas provinsi dengan eksternal Pulau Sulawesi, kemudian sistem transportasi laut nasional di pasal 21 (B).

Pembangunan pelabuhan di garongkong merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka beberapa wilayah yang terisolasi, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan peretanian dan sektor- sektor lainnya.

b. Pembangunan infrastruktur pelabuhan yang berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur adalah bagian *integral* dalam pembangunan nasional. Infrastruktur. Studi menunjukkan pentingnya peranan infrastruktur dalam berbagai hal seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa investasi infrastruktur berpengaruh secara signifikan kepada

pembangunan, terutama pada tahap awal pembangunan suatu negara *World Bank* dalam (Putra, 2016). Ditambahkan oleh Mujeri dalam (Putra, 2016) pembangunan infrastruktur membawa banyak pengaruh positif sehingga bank dunia menyatakan bahwa investasi di bidang infrastruktur memiliki peranan yang jauh lebih besar dari pada investasi dalam bentuk kapital lainnya. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Calderon dan Serven, 2004) menunjukkan bahwa adanya dampak pengembangan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Studi ini menggunakan sampel data 121 negara- Negara pada priode 1960-2000. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang sesuai memberikan pengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kualitas dan kuantitas yang buruk pada pemerataan pendapatan.

Dampak positif pembanguna infrastruktur dijelaskan oleh Dekker et. al dalam (Putra, 2016) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur melalui perluasan kapasitas akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional dan regional. Pembangunan infrastruktur tersebut mesti harus bisa diterima oleh masyarakat dengan berbagai macam pertimbangan seperti pertimbangan lingkungan, tata ruang kota dan aspek sosial ekonomi meskipun biaya pengembangan menjadi lebih mahal.

Pengembangan wilayah yang dirilis *World Bank* (dalam Putra dkk, 2016) mengatakan Peran infrastruktur akan berdampak positif, dan akan

meningkatkan aktivitas sosial masyarakat, yang kemudian akan meningkatkan aktivitas ekonomi, komunikasi, dan akhirnya dapat tercipta berbagai lapangan kerja baru. Artinya peran infrastruktur menunjang pembangunan berkelanjutan daerah sekitar pembangunan, karna adanya penambahan interaksi dan perputaran roda ekonomi.

Pengembangan infrastruktur mempunyai dampak yang sangat berpengaruh dalam prekonomian. Seperti yang dijelaskan oleh (Bhattacharyay, 2008) telah mengidentifikasi peran penting infrastruktur dalam pembangunan wilayah yaitu sebagai faktor dasar mampu mendorong perubahan ekonomi di berbagai sektor baik lokal maupun internasional. Pembangunan infrastruktur yang baik akan berdampak baik pada pengembangan suatu daerah, jadi penting untuk menjaga kualitas infrastruktur karna berdampak luas bagi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maloni dan Jackson ,2005) menemukan hal berbeda pada berbagai pelabuhan besar di Amerika Utara. Oprator pelabuhan lebih memilih untuk meningkatkan produktifitas pelabuhan dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan volume peti kemas yang datang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan biaya investasi dalam melakukan perluasan kapasitas yang disebabkan berbagai kendala. Kemudian hal tersebut lebih diperkuat oleh penelitian (Dundovic et al, 2005)

yang menunjukkan bahwa kapasitas terminal sangat bergantung pada kemampuan peralatan pelabuhan dalam melakukan bongkar muat.

Penyelenggaraan informasi transportasi merupakan hal yang sangat vital dalam pembangunan karena berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar dan mendukung aktivitas masyarakat. Transportasi memiliki fungsi dan peran sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan serta merupakan suatu sistem yang terdiri dari prasarana dan sarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk jaringan prasarana juga jaringan pelayanan (Putra, 2016).

Jadi infrastruktur tidak cuman diartikan sebagai benda berat dan keras namun juga sistem informasi, karna mempunyai pengaruh besar dalam sistem kerja dari informasi kedatangan kapal yang akan berpengaruh kesistem penkargoan dan akan berpengaruh lagi ke sistem yang lain. Infrastruktur yang dijelaskan oleh Tongzon tidak terpaku oleh alat- alat berat yang seriong dijumpai di pelabuhan, namun hal- hal kecil seperti dokumen- dokumen adalah infrastruktur pelabuhan yang mesti diperhatikan pengadaannya untuk menunjang kinerja berkelanjutan infrastrktur pelabuhan. Untuk mengukur kinerja pelabuhan dijelaskan oleh (Triatmojo, 2009) kinerja pelabuhan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pelayanan pelabuhan kepada pengguna pelabuhan (kapal dan barang) tergantung pada waktu dalam pelayanan kapal selama berada di pelabuhan. Kinerja pelabuhan yang tinggi dapat diartikan

juga akan membawa kepada pelayanan yang baik. Kinerja pelabuhan dapat di evaluasi dari sudut pandang efisiensi teknis, efisiensi biaya dan efektifitas (Putra, 2016). Talley mengatakan bahwa efektifitas terkait dengan seberapa baik sebuah pelabuhan menyediakan pelayanan arus barang kepada pengguna perusahaan pelayaran atau pun ekspedisi.

Penilaian kualitas menurut beberapa peneliti, kualitas jasa pelabuhan menggunakan beberapa dimensi dan variable yang beraneka ragam. Variable pelayanan menurut (Kolanovic. I. Et al, 2008) medefinisikan variable pelayanan pelabuhan berupa reabilitas dan kompetensi. Reabilitas terdiri dari 13 atribut yaitu:

- 1) Penundaan kapal
- 2) Keberangkatan kapal
- 3) Waktu tunggu bongkar muat barang
- 4) Rata- rata waktu kapal melakukan bongkar muat barang
- 5) Waktu tunggu truk untuk bongkar muat barang di area terminal
- 6) Kesalahan dokumen
- 7) Kelengkapan dokumen
- 8) Kelengkapan informasi untuk kelengkapan dokumen
- 9) Data statistik pelayanan
- 10) Minimalisasi kegagalan dari pelayanan
- 11) Monitoring kargo

12) Kemampuan konsisten dalam melakukan pelayanan

13) Jaminan ketepatan waktu operasional

Sementara itu (Tongzon, 2004) menentukan beberapa variable pelayanan pelabuhan yaitu tingkat efisiensi pelabuhan yaitu tingkat efisiensi pelabuhan terminal, biaya penanganan kargo, kehandalan atau reabilitas, preposisi pemilihan pelabuhan terminal, kedalaman alur pelayaran. Dalam studi tongzon yang lainnya, (Tongzon, 2002) menggunakan beberapa variable yang menuntukan daya saing pelabuhan yaitu: efisiensi, frekuensi kunjungan kapal, kelengkapan infrastruktur, lokasi, biaya pelabuhan, respon yang cepat terhadap pengguna, serta reputasi terhadap kerusakan barang. Untuk menentukan atribut- atribut dalam dimensi pelayanan jasa pelabuhan perlu memahami karakter kegiatan pelayanan jasa pelabuhan. Fungsi utama dari pelayanan pelabuhan yaitu untuk memperlancar perpindahan intra dan antar moda transportasi, sebagai wadah pusat kegiatan pelayanan transportasi laut dan sebagai pusat kegiatan distribusi dan konsolidasi barang. Karna dari itu dalam menjalankan fungsi pelabuhan memberikan berbagai macam pelayanan (Gurning et, al, 2007)

E. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bagaimana Penelitian ini akan menganalisis tahapan *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. Untuk mengetahui *collaborative governance* tersebut, maka penelitian ini menggunakan indikator *collaborative governance* menurut (Ansell, 2007) yaitu *collaborative governance* mencakup kerja sama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keberhasilan dari *collaborative governance* dalam pembangunan akan mempunyai dua faktor yaitu, faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.

Berikut adalah kerangka pikir yang akan menjelaskan alur penelitian ini, berikut:



Gambar 1 . Bangun Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak di rumusan masalah adalah bentuk *collaborative governance* pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu :

1. Tahapan *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung terjadinya *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Collaborative governance* merupakan sebuah kerja sama yang melibatkan beberapa *stakeholders* seperti pemerintah, swasta dan masyarakat guna untuk mencapai tujuan bersama.
2. Infrastruktur merupakan hal- hal yang mengenai struktur atau fasilitas baik itu mengenai hal fisik maupun non fisik yang mendukung kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri atas daratan maupun perairan sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusaha sebagai

tempat kapal bersandar, naik turunnya penumpang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan intra dan moda transportasi.

4. Pembangunan berkelanjutan, ialah pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang. Seperti aspek ekonomi, social dan lingkungan.
5. Kondisi awal, adalah proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dengan membicarakan atau berdiskusi mengenai potensi yang ada didaerah yang terkena dampak pembangunan, dan mengharuskan semua pihak melakukan kolaborasi.
6. Bentuk kelembagaan, adalah proses melibatkan banyak aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik dan penyediaan serta pengelolaan asset publik.
7. Kepemimpinan, merupakan cara mengelolah, mengatur, mengendalikan keputusan urusan yang berkaitan dengan urusan publik
8. Proses kolaborasi, adalah proses pengerjaan yang melibatkan semua stakeholders dalam semua tahap proses pembuatan keputusan.
9. Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal

10. Faktor pendukung adalah faktor yang sifatnya mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru, karna mengangkat tema *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran dari *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru, maka jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, kemudian memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kualitatif yakni tipe penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, hal tersebut didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa kata-kata menurut informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak), direduksi, ditriangulasi, di simpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi, adapun tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat mengenai suatu keadaan maupun peristiwa, sifat-sifat individu atau gejala yang terjadi terhadap kelompok tertentu (Sugiyono, 2014).

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah seputar *collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru,
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian

D. Informan Penelitian

Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

Table 3.1 . Informan Penelitian

NO.	NAMA INFORMAN	INISIAL	JABATAN
1.	Drs. Anshar Tahir, M.Si	AT	Kepala Dinas Perhubungan Kab.Barru
2.	Drs. Baharuddin, M.Si	BD	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Barru
3.	Puja Setiawan, S.Ip, MH	PS	Lurah Mangempang
4.	Muh. Taring	MT	Direktur Koperasi TKBM
5.	Fatahenna'	FT	Masyarakat
6.	Muhammad Yusuf	MY	Masyarakat
7.	Taslim	TS	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, baik data sekunder dan data primer, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam Studi pustaka ini penulis menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, media *online*, surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Studi lapangan yang dimaksudkan dalam profosal ini yaitu di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. . Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai observasi dan wawancara terhadap para informan. Wawancara dimaksudkan yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang dianggap memahami dan pelakon yang termasuk dalam tema penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model*), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014). Dalam model interaktif ini terdapat empat komponen analisis utama yaitu komponen pengumpulan data (*data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2014), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang

dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan

dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ibu kota kabupaten berada di Kota Barru. Dalam sejarah Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu Kerajaan *Berru* (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Mallusetasi dan Kerajaan Soppeng Riaja.

Sejarah terbentuknya Kabupaten Barru dimulai pada Pemerintahan Sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja masuk dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru yang bernaung di bawah *Afdelling* di Pare-pare. Tanggal 24 Februari 1960 merupakan peristiwa bersejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibukota di Kecamatan Barru, berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 wilayah administratif Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, yang berlokasi ± 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, dan ibu Kota Sulawesi Selatan.

Sebelum dibentuknya regulasi Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 terdiri atas 4 wilayah Swapraja Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Soppeng Riaja, Swapraja Tanete, dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibukota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibukota Kewedanaan Barru.

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi dipesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai garis pantai sepanjang 78 Km. Secara letak geografis berada diantara koordinat 4°5'49" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" Bujur Timur dan berada di sebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh perjalanan darat \pm 2,5 jam. Secara batas administrasi dan batas fisik, Kabupaten Barru terletak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 2 . Peta Kabupaten Barru

Wilayah administrasi Kabupaten Barru berada di bagian barat daratan Pulau Sulawesi sekitar kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar, secara administratif kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 Km². Kabupaten Barru terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Ballusu dan terdiri dari 14 Kelurahan dan 40 Desa.

Table 4.1. Pembagian Luas Administrasi Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas	
			Km ²	%
1	Tanete Riaja	7	174,29	14,84
2	Tanete Rilau	10	79,17	6,74
3	Barru	10	199,32	16,97
4	Sopeng Riaja	7	78,90	6,71
5	Malusetasi	8	216,58	18,44
6	Pujanauting	6	314,26	26,75
7	Balusu	6	112,20	9,55
	Total	54	1174,72	100%

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2020

a. Kependudukan

Penduduk di Kabupaten Barru pada tahun 2020 adalah sebesar 171.906 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 146 jiwa/Km². Jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Barru adalah 40.705 jiwa, namun kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Tanete Rilau adalah 425 jiwa/km². Jumlah rumah tangga pada tahun 2020 adalah 40.866 KK, dengan rata-rata anggota rumah tangga adalah 4 jiwa/KK.

Table 2.2 . Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Barru

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Jml Penduduk	Jml Keluarga	Rata-rata	
		(Km ²)	(Jiwa)	(KK)	(Jiwa/Km ²)	(Jiwa/KK)
1	Tanete Riaja	174.29	22,634	5,425	130	4
2	Tanete Rilau	79.17	33,652	7,917	425	4
3	Barru	199.32	40,705	9,532	204	4
4	Soppeng Riaja	78.90	17,869	4,398	226	4
5	Mallusetasi	216.58	25,494	6,236	118	4
6	Pujananting	314.26	13,064	2,883	42	5
7	Balusu	112.20	18,488	4,475	165	4
Total		1,174.72	171,906	40,866	146	4

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2020

b. Tata Ruang Wilayah

Dalam konteks wilayah Kabupaten Barru, dilakukan suatu kajian secara spesifik pada kawasan- kawasan strategis di wilayah Kabupaten Barru. Kawasan Strategis Kabupaten Barru yang dimaksud adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten diarahkan pada Pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas Garongkong dan simpul transportasi darat, laut, dan kereta api berupa Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Garongkong; dan Pengembangan kawasan perbelanjaan skala pelayanan kabupaten berupa KSK Baru yang sekaligus pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kesehatan.

Berdasarkan pemanfaatan lahannya secara umum terbagi atas $\pm 47,23$ persen didominasi oleh hutan, $\pm 15,82$ persen kebun campuran, $\pm 13,59$ persen areal Persawahan, $\pm 10,82$ persen areal semak belukar. Adapun pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Table 4.3 . Tata Guna Lahan Kabupaten Barru

NO	PENGUNAAN TANAH	LUAS DAN PROSENTASE	
		Ha	PROSENTASE (%)
1.	Kampung / Pemukiman	2.767,92	2,36
2.	S a w a h	15.959,23	13,59
3.	Kolam / Tambak	2.903,55	4,47
4.	Kebun Campuran	18.586,95	15,82
5.	Ladang / Tegalan	5.138,70	4,37
6.	Lahan Terbuka	3.367,53	2,87

7.	Mangrove	288,89	0,25
8.	Semak Belukar	12.712,11	10,82
9.	Alang - alang	265,32	0,23
10.	Hutan	55.481,80	47,23
TOTAL		117.472,00	100,00

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2020

c. Gambaran Umum Kelurahan Mangempang

Secara Administratif wilayah Kelurahan Mangempang masuk dalam wilayah Kecamatan Barru. Terletak \pm 2 Km dari pusat kota Kabupaten Barru dan sebelah utara dari pusat kota. Pelabuhan garongkong masuk dalam wilayah administratif kelurahan Mangempang. Kecamatan Barru dengan posisi geografis pada koordinat 4°25'49" Lintang Selatan.

Penduduk di kelurahan Mangempang tahun 2020 adalah sebesar 5602 jiwa. Dengan perincian laki- laki 2792 Jiwa dan perempuan 2810 Jiwa. Jumlah rumah tangga pada tahun 2020 adalah 1539 KK, dengan rata-rata anggota rumah tangga adalah 4 jiwa/KK.

d. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Barru

Perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan kabupaten Barru mempunyai tugas membantu bupati

melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang perhubungan. Pembagian urusan pemerintah di bidang perhubungan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Berikut fungsi- fungsi dari dinas perhubungan

- a. Penerbitan izin angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan izin usaha angkut laut bagi pelayaran rakyat bagi orang peorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha
- d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

- f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kotayang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
- g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoprasian kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.
- h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota.
- j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
- k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
- l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal.
- m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan sungai dan danau.
- n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan sungai dan danau.
- o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.

- p. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan Selma 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.

Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal

- e. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan pada perda tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Barru Termasuk Organisasi Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kependudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru. Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

f. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

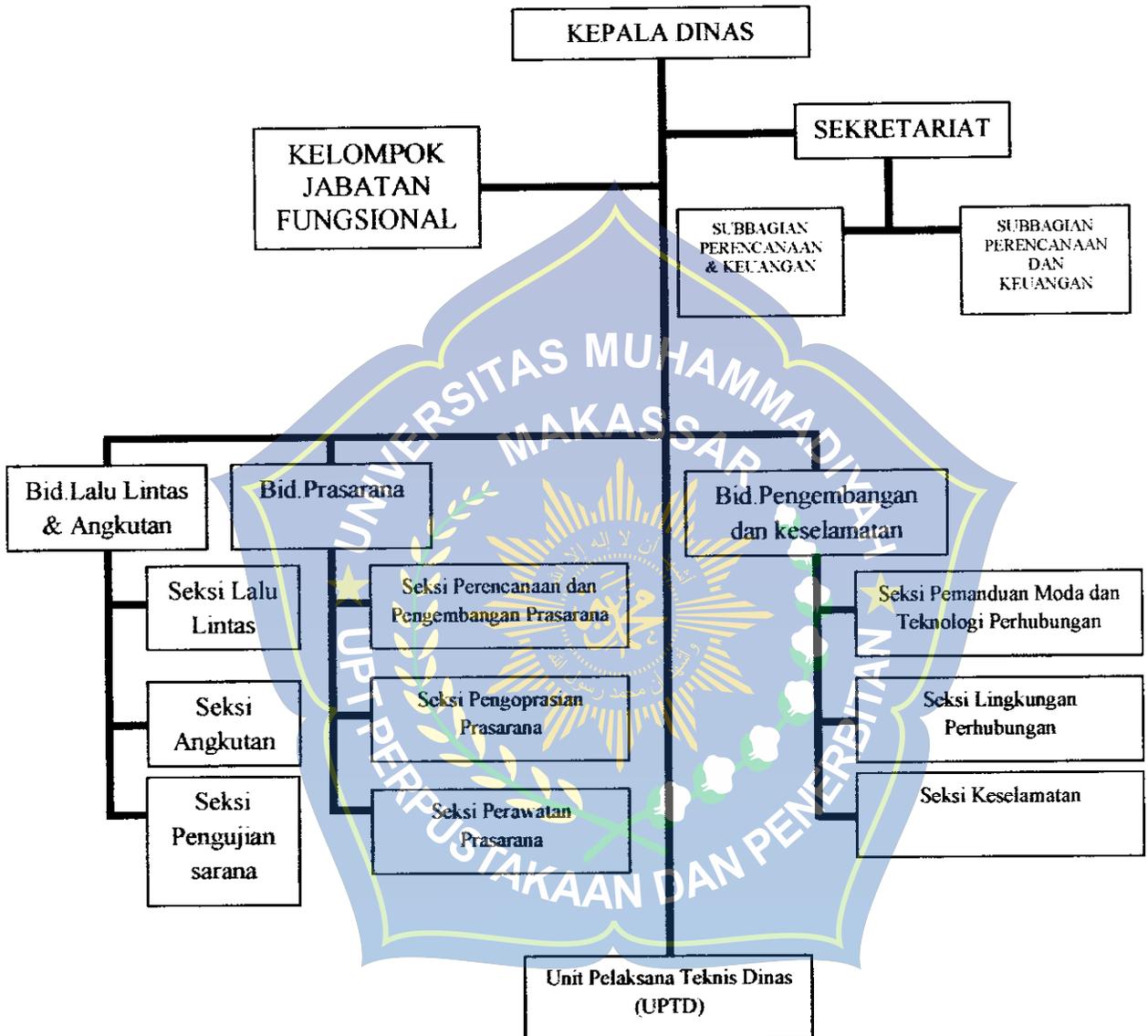
g. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Barru mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis penyelenggaraan di Bidang Perhubungan
- 2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang perhubungan
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
- 5) Pelaksanaan tugas lai yang diberikan oleh bupati



h. Struktur Organisasi Perangkat Daerah



Gambar 3 . Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barru

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
- 2) Kepala Dinas
- 3) Sekretariat :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Umum
- 4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
 - a) Seksi Lalu Lintas
 - b) Seksi Angkutan dan
 - c) Seksi Pengujian Sarana
- 5) Bidang Prasarana
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana
 - b) Seksi Peoprasian Prasarana
 - c) Seksi Perawatan Prasarana
- 6) Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - a) Seksi pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c) Seksi Keselamatan
- 7) Unit Pekerja Teknis Dinas (UPTD)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

B. Pembahasan Hasil Penelitian

a. *Collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan

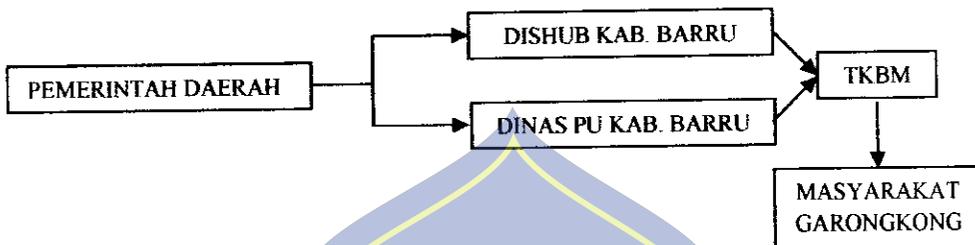
Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru

Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal *Collaborative Governance* dalam pembangunan berkelanjutan melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Dalam proses pembangunan berkelanjutan pelabuhan dibantu oleh pihak masyarakat Lingkungan Garongkong karna letak pelabuhan dekat dengan pemukiman warga Lingkungan Garongkong.

Dinas Perhubungan dalam hal ini dipercaya oleh pemerintah untuk mengelolah pembangunan berkesinambungan di Pelabuhan Garongkong berkerja sama dengan pihak PBM (Perusahaan Bongkar Muat) sebagai pemberi kerja yang bertugas untuk menyediakan infrastruktur pembongkaran barang dan akses penunjang lain bagi penumpang di bantu oleh organisasi masyarakat sipil Koperasi TKBM sebagai pihak penyedia jasa tenaga kerja.

Collaborative governance dalam teori (Ansell dan Gash, 2007) adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi *consensus*, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelolah program atau aset publik. Kolaborasi penting untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif

dalam proses pengerjaan. Berikut jalur koordinasi dalam *collaborative governance* dalam pembangunan di pelabuhan Garongkong.



Gambar 4 . Jalur koordinasi dalam kolaborasi di Pelabuhan Garongkong

a. Kondisi Awal

Kondisi awal, adalah proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dengan membicarakan atau berdiskusi mengenai potensi yang ada di daerah yang terkena dampak pembangunan, dan mengharuskan semua pihak melakukan kolaborasi dalam proses pembangunan. Artinya setelah melihat potensi sebuah daerah maka pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sipil melakukan kolaborasi yang diinisiasi oleh pihak pemerintah.

Berikut hasil wawancara penulis dengan BD selaku Direktur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Barru mengenai kondisi awal pembangunan :

“Ada pihak pemerintah, ada pihak swasta, katakanlah misalnya dia seorang rekan menggunakan perusahaannya. Masyarakat disana sebagai pelaksana, pembantu, banyak peran masyarakat disitu, bayangkan kalau dia memberikan dia punya lahan. Itu peran masyarakat, aktif dalam pembangunan”

Kesimpulan wawancara dari informan BD dalam hal kondisi awal pembangunan adalah pihak pemerintah melakukan mediasi yang baik dengan

masyarakat Lingkungan Garongkong sehingga terbukti seperti yang dikatakan BD dalam pembebasan lahan masyarakat antusias menyambut hadirnya pelabuhan di Lingkungan Garongkong. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Danahue dalam (Sudarmono,2011) salah satu inisiatif *collaborative governance* . Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting untuk memediasi masyarakat di dalam kondisi awal kolaborasi untuk membebaskan lahan untuk dibangun pelabuhan. Kemudian pihak dari masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dengan pembangunan lokasi pelabuhan memberikan tanah miliknya oleh Negara melalui berbagai tahapan negosiasi.

Berikut hasil wawancara penulis dengan PS selaku Lurah Mangempang mengenai kondisi awal pembangunan :

“Kami lakukan pendekatan emosional dulu, kita sampaikan , bahwa tanah yang bersangkutan terkena pembebasan lahan, maka diharapkan untuk mempersiapkan berkas- berkas kita akan membangun”

Berdasarkan wawancara dari informan PS dalam hal kondisi awal pembangunan pelabuhan, pemerintah dalam melakukan koordinasi ke masyarakat menggunakan pendekatan emosional dengan cara- cara humanis sehingga pembebasan lahan berjalan tanpa hambatan. Informan PS melakukan negosiasi yang baik ke masyarakat karna model pendekatan ke masyarakat menggunakan pendekatan humanis, ini termasuk bentuk model pemerintah kolaboratif seperti yang dikatakan (Ansell dan Gash, 2007) yang menjelaskan tentang indikator kolaborasi yang baik. indikator tersebut telah diperlihatkan oleh informan PS karna melakukan negosiasi secara humanis. Karna

pendekatan human, adalah cara yang cocok digunakan untuk melakukan pendekatan ke masyarakat yang mempunyai keragaman dan mengedepankan kekeluargaan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan FT selaku Tokoh Masyarakat Lingkungan Garongkong tentang kondisi awal :

“ Iya ada, yang perwakilan waktu itu Pak Armin , pak HJ. Kadir kepala lingkungan pada saat itu, masyarakat awalnya senang mendengar adanya pelabuhan”

Terkait respon masyarakat pada awal pembangunan sesuai yang dikatakan FT adalah pemerintah pendapat sikyal baik oleh masyarakat setempat dikarenakan masyarakat senang adanya pelabuhan. Respon baik dari masyarakat ini sesuai yang dikatakan Danahue dalam (Sudarmo, 2011) tentang inisiatif *collaborative governance*, artinya setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut. Transparansi kebijakan adalah sebuah bentuk inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kemasyarakat tentang kebijakan yang ada. Hal ini dapat terlihat di cara pemerintah memidiasi ke masyarakat garongkong dan masyarakat garongkong pada saat itu memberikan respon positif akan kebijakan tersebut.

b. Bentuk Kelembagaan

Bentuk kelembagaan adalah proses melibatkan banyak aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik dan penyediaan serta pengelolaan aset publik.

Berikut hasil wawancara penulis dengan AT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru tentang pembentukan kelembagaan :

“Di Pelabuhan Garongkong itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Barru bukan kami yang turun langsung ke sana, kami disana punya UPTD (Unit Pelaksana Terknis Dinas) yang dipimpin oleh kepala UPTD, jadi disana itu mereka berkoordinasi dengan orang kepelabuhanan dan tugas kami meminta retribusi kepada setiap kendaraan yang masuk di pelabuhan.”

Kesimpulan wawancara dari informan AT dalam hal pembentukan kelembagaan adalah pihak Dinas Perhubungan mempercayakan pemungutan retribusi masuk pelabuhan kepada UPTD yang khusus menangani langsung kepelabuhanan. Ketika melihat tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, berdasarkan turunan dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Masih banyak fungsi dari Dinas Perhubungan yang belum diberi wewenang secara massif di Pelabuhan Garongkong.

Berikut hasil wawancara penulis dengan MT selaku Direktur Koperasi TKBM tentang pembentukan kelembagaan :

“Proses perkembangan pelabuhan masyarakat setempat mendapatkan lapangan kerja yang TKBM sudah berbadan hukum yang dinamakan Koperasi TKBM yang beroperasi di jasa tenaga bongkar muat, disitu sudah ada peran Swasta sebagai pemberi kerja yaitu PBM (Perusahaan Bongkar Muat) jadi kalau PBM mendapatkan *Job* maka otomatis Koperasi TKBM yang kerja.”

Hasil wawancara dari informan MT dalam hal pembentukan kelembagaan adalah masyarakat Garongkong memperjuangkan hak nya dan berhasil bernegosiasi dengan pihak swasta tentang pembagian *Job*. Dalam *collaborative governance* masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* harus memiliki peran dalam tujuan- tujuan dari kolaborasi sesuai yang digambarkan oleh Donahue dalam (Sudarmo, 2011) tentang aspek untuk memulai inisiatif- inisiatif dalam *collaborative governance*. Dengan memperjuangkan haknya sebagai organisasi masyarakat dalam jasa tenaga pihak TKBM berhasil mengambil peran strategis dalam keberlangsungan pengelolaan di Pelabuhan Garongkong.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan, merupakan cara mengelolah, mengatur, mengendalikan suatu keputusan atau urusan yang berkaitan dengan urusan publik. Menurut (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan bahwa para *stakeholder* harus terlibat dalam segala tahapan proses pembuatan keputusan, walaupun otoritas tertinggi terletak pada aktor publik, tetapi semua *stakeholders*

memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil kebijakan. Karna tujuan dari kolaborasi adalah mencapai tingkat kesepakatan antara *stakeholders*. Jadi kesepakatan adalah faktor penting yang mempengaruhi *collaborative governance*. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mampu mengatur dan beberapa anggotanya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Berikut hasil wawancara penulis dengan AT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru tentang kepemimpinan :

“Di Pelabuhan Garongkong itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Barru bukan kami yang turun langsung ke sana, kami disana punya UPTD (Unit Pelaksana Terknis Dinas) dan di Pelabuhan Garongkong bukan sepenuhnya kami yang mengelolah makanya banyak dari keberlangsungan pembangunan tidak terawat dengan baik karna bukan kami sepenuhnya yang pegang. Namun ini sementara kita loby ke provinsi bagaimana supaya Dinas Perhubungan Kabupaten Barru bisa mengelolah sepenuhnya. Supaya ketika ada pembangunan infrastruktur yang rusak bisa diganti. Karna selama ini yang bisa diganti hanya sifatnya barang yang murah seperti lampu penerangan yang sifatnya bisa tidak dianggarkan. Kalau berbicara infrastruktur yang lebih besar lagi itu kami tidak punya wewenang.”

Hasil wawancara dari informan AT dalam hal kepemimpinan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru masih belum menguasai sepenuhnya pengelolaan di Pelabuhan Garongkong. Padahal ketika melihat tugas fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

dibidang Perhubungan. Dan ketika melihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, di poin (m) tentang pelayaran, dinas perhubungan mempunyai tugas pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan sungai dan danau. Artinya Dinas Perhubungan mempunyai hak untuk izin perbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan. Namun kondisi di kabupaten baru belum mampu untuk melaksanakan pembangunan yang sifatnya anggaran yang besar.

Dalam hal pengelolaan buruh diinisiasi oleh masyarakat Berikut hasil wawancara penulis dengan MY selaku Masyarakat Garongkong tentang kepemimpinan :

“di Garongkong seharusnya tidak boleh lembaga jasa lain yang bergerak mengelolah jasa kepelabuhanan, rekomendasi dari Dinas Perhubungan kemarin membentuk nama Koperasi Simaturue. Namun menurut kami ada kesalahan, karna pembentukannya dari atas dan kami sempat berseberangan dengan pemerintah. Bukan karna kami lawan, namun karna aturan mereka yang salah. Dan ternyata di dekengi oleh beberapa pejabat. Dan kami mengajukan permohonan ke Kejaksaan Negeri dan kami menangkan, dan sampai sekarang kami yang kelolah jasa Tenaga Kerja di Pelabuhan Garongkong”.

Mempertahankan kesejatraan rakyat tentu harus diperjuangkan seperti wawancara yang dilakukan dengan AT dalam pejelasannya Koperasi Siamturue adalah Koperasi sah yang dikelolah oleh masyarakat guna menjamin keberlangsungan kesejatraan masyarakat Garongkong masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini senada dengan konsep pembangunan

berkelanjutan yang dikemukakan oleh (Sutmihardja, 2004) tentang upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan FT selaku Masyarakat Garongkong tentang kepemimpinan :

“iye masyarakat dipekerjakan, seperti buruh dan pekerja kontruksi semua pelabuhan begitu.”

Kesimpulan wawancara dari informan FT dalam hal kepemimpinan adalah adanya *Collaborative Governance* antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta selaras yang dikatakan oleh informan AT tentang koperasi TKBM Simaturue yang sebagai wadah masyarakat untuk mendapat haknya sesuai prinsip *collaborative governance*.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi adalah proses pengerjaan yang melibatkan semua stakeholders dalam semua tahap proses pembuatan keputusan .

Berikut hasil wawancara penulis dengan BD selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Barru :

“tidak menghabiskan dan dikembangkan lagi dan meningkatkan kesejahteraan, dengan adanya pelabuhan orang sudah mulai bekerja, tenaga kerja mulai terbuka perusahaan menyaring masyarakat yang punya keterampilan dan skil dan masyarakat disana pasti dilibatkan, semua pihak diuntungkan, masyarakat dilibatkan orang sudah menjual, prekonomian maju, masyarakat dari segi pendapatanya, akses percepatan dari kalimantan, tidak lagi makassar semua mendapatkan mendapatkan manfaat dari segi ekonomi sosial dan budaya.”

Upaya pembangunan berkelanjutan menurut (Sutamihardja, 2004) salah satunya adalah mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang selaras dengan wawancara dari informan BD dalam hal proses kolaborasi adalah imbas dari proses kolaborasi semua diuntungkan baik pihak pemerintah sebagai inisiator dengan retibusinya, swasta sebagai pihak kedua dan masyarakat setempat yang menikmati pembangunan dengan cara meningkatkan perekonomiannya. Artinya semua pihak diuntungkan bahkan masyarakat setempat dengan adanya pelabuhan menjadi tempat mata pencarian baru untuk masyarakat dan tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selaras yang dikatakan BD tentang proses kolaborasi, Berikut hasil wawancara penulis dengan FS selaku Lurah Mangempang Kab.Barru :

“pembangunan berkelanjutannya Tetap harus dipertimbangkan dek, bagaimanapun caranya supaya anak cucu kita dibelakang nanti tetap merasakan manfaatnya, bukan hanya hal negatifnya didapat, itulah gunanya pemerintah- pemerintah ada untuk mengayomi masyarakat .”

Kesimpulan wawancara dari informan FS dalam hal proses kolaborasi adalah dalam proses kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat saling menjaga sumberdaya alam digarongkong sehingga hal- hal positif tetap dirasakan oleh masyarakat. Karna (Sutamihardja, 2004) dalam sasaran pembangunan berkelanjutan mengatakan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai manfaat

jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Artinya pemanfaatan dari sumber daya alam yang dikelola harus sesuai dengan standar yang telah diatur supaya tetap tercipta keseimbangan lingkungan dengan baik.

2. Perkembangan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru

Dekatnya kawasan pelabuhan dengan hutan sangat rentan untuk terjadinya perusakan lingkungan. Di pelabuhan andi mattalatta garongkong termasuk dekta dengan kawasan hutan mangrove namun keberadaan pelabuhan ternyata sudah sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan sesuai yang dikatakan oleh informan FT dalam wawancaranya :

“selama ini tidak ada masalah dengan lingkungan, aman- aman saja. Malah kami yang menanam bakau di belakang rumah kami”

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwasanya warga di daerah garongkong tidak mendapytkan dampak kerusakan lingkungan dari adanya pembangunan lingkungan artinya lingkungan tetap terjaga sehingga masih bisa di fungsikan sebagai mana mestinya seperti yang dikatakan oleh (Brundlandt, 2001).

Pembangunan berkelanjutan tersebut tetap disupport dan dijaga oleh pemerintah dan pemerintah konsisten terhadap pembangunan berkelanjutan,

berikut wawancara dengan informan FS selaku Lurah Mangempang Kab.Barru :

“pembangunan berkelanjutannya Tetap harus dipertimbangkan dek, bagaimanapun caranya supaya anak cucu kita dibelakang nanti tetap merasakan manfaatnya, bukan hanya hal negatifnya didapat, itulah gunanya pemerintah- pemerintah ada untuk mengayomi masyarakat .”

Proses pembangunan berkelanjutan di sekitaran pelabuhan garongkong merupakan tanggung jawab bersama yang harus tetap dijaga, kesimpulan dari wawancara dengan informan FS pembangunan berkelanjutan itu bukan suatu hal penting, pemafaatan harus bisa dijaga sampai generasi selanjutnya dan merupakan tanggung jawab bersama

3. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Collaborative Governance

a. Faktor pendukung

Segala hal yang mendukung jalannya kolaborasi dari awal hingga terlaksananya kolaborasi adalah bentuk dari faktor pendukung dari kolaborasi seperti hal yang disampaikan oleh PS selaku Lurah Mangempang mengenai kesepakatan prosedural yaitu :

“Kami lakukan pendekatan emosional dulu, kita sampaikan , bahwa tanah yang bersangkutan terkena pembebasan lahan, maka diharapkan untuk mempersiapkan berkas- berkas kita akan membangun”

Melihat wawancara dari informan PS cara perpanjangan tangan dari pemangku kepentingan ini dalam meloby masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan emosional, hal tersebut dinilai wajar dikarnakan

yang mengetahui kondisi keseharian masyarakat maupun dinamika yang terjadi di lingkungan Garongkong tersebut ialah Lurah Mangempang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan emosional sangatlah tepat dikamarkan kondisi di daerah yang cenderung menggunakan sistem kekeluargaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dan hal tersebut sukses mencapai kesepakatan dengan masyarakat dalam pembebasan lahan ditahap awal kolaborasi.

Kesepakatan lain dikemukakan oleh MY selaku Tokoh Masyarakat mengenai Faktor Pendukung melalui kesepakatan procedural :

“kami melakukan kesepakatan dan kami menangkan di pengadilan dan kami berhak atas pengolaan tenaga jasa di pelabuhan garongkong”.

Menarik kesimpulan dari wawancara informan MY dapat dicermati bahwa kesepakatan procedural harus sesuai dengan kesepakatan dan dipertahankan dari awal sampai terlaksananya sebuah kolaborasi karna ketika ada kesepakatan lain diluar dari kesepakatan sebelumnya itu akan menimbulkan permasalahan, terbukti dengan langkah pemerintah yang merubah kebijakan terhadap pengelolaan jasa tenaga di pelabuhan garongkong yang pemerintah ingin mencampuri lebih dari wewenang yangtelah di sepakati akhirnya timbul permasalahan. Namun masyarakat setempat bersatu untuk mempertahankan kesepakatan awal dari beberapa

stakeholder akhirnya kolaborasi dalam pembagian wewenang berjalan dengan baik.

Faktor selanjutnya faktor intistusional bisa mempengaruhi kolaborasi apabila pihak yang berkepentingan melakukan koordinasi secara terbuka dan menerima segala aspirasi masyarakat di awal kolaborasi sampai proses kolaborasi berjalan, berikut hasil wawancara penulis dengan MT selaku Direktur Koperasi TKBM tentang pembentukan kelembagaan :

“Proses perkembangan pelabuhan masyarakat setempat mendapatkan lapangan kerja yang TKBM sudah berbadan hukum yang dinamakan Koperasi TKBM yang beroperasi di jasa tenaga bongkar muat, disitu sudah ada peran Swasta sebagai pemberi kerja yaitu PBM (Perusahaan Bongkar Muat) jadi kalau PBM mendapatkan *Job* maka otomatis Koperasi TKBM yang kerja.”

Pendapat dari informan MT dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah telah konsisten dari kesepakatan, dengan catatan tentunya ketika melihat kondisi di lapangan tentu melalui beberapa tahapan yaitu dengan loby masyarakat ke pemerintah tentu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku sehingga dapat dilihat koordinasi PBM dengan TKBM serta DISHUB maupun PEMDA KAB.BARRU berjalan dengan baik. dan para *stakeholders* tersebut saling menjaga komitmen yang tela disepakati bersama.

Berikut hasil wawancara penulis dengan BD selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Barru tentang faktor pendukung kolaborasi melalui pengetahuan sumber daya manusia :

“dengan adanya pelabuhan orang sudah mulai bekerja, tenaga kerja mulai terbuka perusahaan menyaring masyarakat yang punya keterampilan dan skill dan masyarakat disana pasti dilibatkan, semua pihak diuntungkan, masyarakat dilibatkan orang sudah menjual, prekonomian maju, masyarakat dari segi pendapatannya, akses percepatan dari kalimantan, tidak lagi makassar semua mendapatkan mendapartkan manfaat dari segi ekonomi sosial dan budaya.”

Keterampilan dan skill SDM yang ada dalam ruang lingkup *stakeholders* dalam kolaborasi ini sangatlah penting seperti yang dikatakan oleh Emerson dan Nabatchi dalam (Ulfa, 2018) tentang faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* salah satunya yaitu tentang SDM yang berkolaborasi harus memiliki pengetahuan secara maksimal dalam kolaborasi tersebut dan ini selaras dengan upaya pembangunan berkelanjutan menurut (Sutamihardja, 2004) salah satunya adalah mempertahankan kesejatraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang selaras dengan wawancara dari informan BD dalam hal proses kolaborasi adalah imbas dari proses kolaborasi semua diuntungkan baik pihak pemerintah sebagai inisiator dengan retibusinya, swasta sebagai pihak kedua dan masyarakat setempat yang menikmati pembangunan dengan cara meningkatkan perekonomiannya. Artinya semua pihak diuntungkan bahkan masyarakat setempat dengan adanya pelabuhan menjadi tempat mata pencarian baru untuk masyarakat dan tentu meningkatkan prekonomian masyarakat.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang melatar belakangi kebijakan tidak terlaksana secara baik. Dalam konteks ini faktor penghambat *collaborative governance* dalam pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Kabupaten Barru yaitu dapat dilihat dari wawancara penulis dengan AT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru mengenai Hambatan dalam faktor budaya:

“masih banyak kekurangan di infrastruktur dikarenakan bukan PEMDA BARRU yang mengelolah sepenuhnya, karna masih dalam pengelolaan oleh pusat sehingga kondisi disana itu banyak yang tidak terawat karna yang mempunyai wewenang penuh adalah pemerintah pusat, namun kami sudah koordinasikan beberapa kali melalui PEMDA BARRU supaya pengelolaan disana kami yang kelolah, kami sudah mengusulkan beberapa kali namun belum direspon.”

Melihat wawancara dengan pihak PEMDA BARRU dalam hal ini KADIS Perhubungan Kab. Barru beliau mengakui banyak infrastruktur yang sudah seharusnya diganti namun belum diganti, mengingat usia pelabuhan garongkong sudah lebih dari 10 tahun sehingga banyak infrastruktur yang mesti diganti. Namun mengingat wewenang yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Barru belum sepenuhnya menguasai pengelolaan pelabuhan garongkong makanya banyak infrastruktur yang mestinya diganti namun belum juga diperbaharui. Hal tersebut sudah sesuai apa yang dikatakan oleh (Sudarmo, 2011) yang mengatakan terkait dengan faktor budaya bahwa

kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko.

Untuk menciptakan kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayanan publik dan dengan demikian para pemimpinnya untuk memiliki *skills* keterampilan dan kesediaan untuk masuk ke kemitraan secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Jadi ada kecendrungan pemerintah hanya sekedar membangun namun tidak mau melakukan inovasi dalam sebuah kebijakan dalam kolaborasi karna hanya berfokus kepada hasil, dan ini terjadi di pelabuhan garongkong yang pembangunan infrastrukturnya kurang di pelihara sehingga akan mempengaruhi minat masyarakat untuk ke pelabuhan garongkong sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Adanya pengaruh dari pihak lain selama proses kolaborasi akan berpengaruh kepada proses kolaborasi dan akan menghambat jalannya kolaborasi karna perbedaan kepentingan, hal ini dijelaskan oleh MY selaku Tokoh Masyarakat mengenai faktor politik :

“dari segi hambatan diawal pembangunan ada sedikit perbedaan selisih antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Karna pemerintah awalnya berjanji pengelolaan tenaga jasa masyarakat garongkonglah yang berhak atas pengelolaan tersebut namun pemerintah ingin mengatur segala hal termasuk pembentukan kooperasi di garongkong yang dimana kooperasi ini kedepannya sebagai wadah masyarakat untuk mempunyai badan hukum sendiri secara resmi untuk mengelolah tenaga jasa masyarakat, sekaligus menjadi wadah sumber pendapatan masyarakat setempat namun pemerintah ingin mencampur tangan lebih dalam hal tersebut sehingga kami melakukan kesepakatan dan kami menangkan di pengadilan dan kami berhak atas pengolaan tenaga jasa di pelabuhan garongkong.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka pihak dari masyarakat merasa ada perbedaan dari kesepakatan awal alhasil ada semacam gerakan perlawanan dilakukan oleh masyarakat karna dalam proses kolaborasi diawal pembangunan ternyata pemerintah setempat ada perubahan perjanjian, dimana janji pemerintah dikondisi awal kolaborasi menjanjikan masyarakat yang mengelolah terkait jasa tenaga namun dalam perkembangannya perintah pusat ingin mencampuri urusan diluar dari kesepakatan awal dan cenderung memandang sepele kepentingan masyarakat,

Permasalahan tersebut masuk dalam hambatan kolaborasi dalam hal politik seperti yang dikatakan oleh (Sudarmo, 2011) tentang Faktor yang lain yang bisa menjadi gagalnya sebuah kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antara *stakeholder* yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara *stakeholder* termasuk para pemimpin masing-masing kelompok. faktor – faktor yang menghambat kolaborasi. Hal diatas termasuk faktor penghambat dari segi politik karna pemerintah ada perbedaan kesepakatan .

Tabel 4. Matrix Penelitian Dan Pembagian Tugas *Stakeholders* Yang Terlibat

No	Stakeholders	Tugas/ Wewenang	Kontribusi
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Barru	Pihak yang menginisiasi pembangunan pelabuhan menyiapkan serta membuat kebijakan tentang	a. Mengesahkan perda tentang perizinan pembangunan b. Memberikan izin pengerjaan pelabuhan serta melakukan monitoring dan evaluasi
2	Dinas Perhubungan Kabupaten Barru	Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Perumusan Kebijakan Teknis penyelenggaraan di Bidang Perhubungan b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang perhubungan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati
2	Perusahaan Bongkar Muat	Perusahaan yang dipercayakan untuk mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana pendistribusian penumpang maupun barang ke kapal	Menyediakan alat- alat penunjang dalam proses pelayanan penumpang maupun barang di Pelabuhan Garongkong

3.	Koperasi TKBM	Organisasi yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menyediakan dan merekrut tenaga jasa untuk pedistribusian yang dilakukan oleh pbm	Organisasi yang menyiapkan tenaga jasa untukmengelola jasa bongkar muat di Pelabuhan Garongkong
4.	Masyarakat Garongkong	Melaksanakan tenaga jasa bongkar muat yang dibutuhkan TKBM	Tenaga jasa bongkar muat di Pelabuhan Garongkong



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya mengenai *collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di pelabuhan garongkong kabupaten baru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam (Ulfa, 2018) yang memiliki empat tahapan menemukan bahwa :
 - a. Kondisi awal, mediasi dengan menggunakan pendekatan emosional oleh lurah Mangempang.
 - b. Proses kelembagaan, terdapat ada perbedaan pendapat dari kesepakatan awal yang disepakati.
 - c. Kepemimpinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru belum menguasai sepenuhnya pengelolaan aktifitas kepelabuhanan di Pelabuhan Andi Mattalatt Garongkong Kabupaten Barru
 - d. Proses kolaborasi, semua pihak diawal sampai berjalannya kolaborasi bekerja dengan baik namun belum maksimal

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung merupakan dua faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan berkelanjutan Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru.

a) Faktor pendukung

- 1) Kesepakatan Procedural, kolaborasi berjalan lancar karena menjaga kesepakatan dan komitmen bersama pada awal kolaborasi
- 2) Intitusi, semua *stakeholders* terkhusus pemerintah yang terlibat bekerja sebagaimana mestinya namun masih perlu ditingkatkan
- 3) Pengetahuan sumber daya manusia, sangat mendukung kolaborasi namun di tingkatan masyarakat masih di tenaga jasa

b) Faktor penghambat

- 1) Budaya, pemerintah yang masih cenderung berorientasi kepada hasil namun kurang di wilayah monitoring dan evaluasi di pelabuhan garongkong
- 2) Politik, pemerintah belum konsisten dalam kesepakatan yang telah disepakati

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran penulis untuk dapat meningkatkan Collaborative dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di pelabuhan garongkong, yaitu:

1. Pihak Pemerintah dalam melaksanakan kolaborasi yang baik harus lebih banyak berinovasi dalam melakukan kerja sama, terutama dalam proses berjalannya kolaborasi pihak pemerintah harus lebih banyak mengambil peran
2. Peningkatan kesejatraan masyarakat yang bekerja dimasyarakat dalam hal ini yang bekerja sebagai buruh jasa tenaga agar dibuatkan Tokoh sehingga memberi tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Karna masyarakatlah penggerak dan pendukung pemerintah dalam melaksanakan segala bentuk kebijakan yang ada di pelabuhan garongkong

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. & G. A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Jurnal of Public Aministraton Research and Theory. Published by Oxford Univesity Press.*
- Anonim. (2017). *Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. Perikanan Indonesia, (Perikan. Indones.).*
- Mattalatta, A. (2014). *Meniti Siri' dan Harga Diri; catatan dan kenangan. In Khasanah Manusia Nusantara. No.3.*
- Brundland, T. (2011). *No TitlAfter Boyle and the leviathan. The Second Generation of British Air Pumps, (Annals of Science), 68(1), 93–124.*
- Dundovic, Cedomir dan Hess, S. (2005). *Exploitability of the Port Container Terminal Stacking Area Capacity in the Circumstances of Increased Turnover. ISEP 2005.*
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. (2018). *Kabupaten dan Kota. Daftar Kabupaten Kota. (2018). Makassar, Penulis. Diakses dari https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2*
- Emerson, K. et. a. (2001). *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Jurnal of Public Administration Research and Theory, JPART 22:1.*
- Febrian, R. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, Tinjauan K(2(2)), 200–208.*
- Gurning, Raja Oloan Saut dan Budiyanto, E. H. (2007). *Manajemen Bisnis Pelabuhan. Penerbit Gramedia Pustaka Umum,*
- Hartman, C., et al. (2002). *Enviromental Collaboration: Potential and Limits. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds. Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J., (pp.21-40)(Partnership and Leadership Building Alliances For a Sustainable Future).*
- Jinca, Y. N. (2011). *Transportasi Laut Indonesia. Analisis Studi Kasus. Brilian Internasional, Surabaya.*

- Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. (2017). Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa. Jakarta: Elviana Roza. Diakses dari <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Kolanovic, I., Skenderovic, J. . Z. Z. (2008). Defining the Port Service Quality Model by using the Port Service Quality Model by Using the Factor Analysis. *Pomorsvo*, 22(2):283-.
- Lawalata, G. M. (2011). Measuring Transportation. Traffic. Mobility. And Accessibility. *Victoria Transport Policy Institute*. Retrieved from Victoria.www.vtpi.org
- Muksin, I. (2009). Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Muloni, Michael dan Jackson, E. C. (2005). North American Container Port Capacity : A Literture Review. *Transportation Jurnal*, Vol.44, No, hlm.16-36.
- Mutiarawati, T, S. (2017). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, Vol 1 No.2, hal. 48-62.
- Putra, A. A., & Djalante, S. (2016). Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 6(1).
- Romadhani, N.F.,& Jinca, M. Y. (2013). Perspektif Pengembangan Jaringan Transportasi Dalam Mendukung Kek Barru Sulawesi Selatan. *Perspektif Pengembangan Jaringan Transportasi Dalam Mendukung Kek Barru Sulawesi Selatan*, 25(6), 400-406.
- Sudarmo. (2009). collaborative Governance. *Spirit Publik*.
- Sudarmo. (2011). Isu- isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. *SmartMedia*.
- Sudaryadi. (2007). Dampak Pembangunan Jalur Lintas Selatan Terhadap Output Sektor Produksi. *Tesis MEISP UNDIP*.
- Sugiono, P. D. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Indonesia. *ALFABETA*.

- Sutamihardja. (2004). *Perubahan Lingkungan Global. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*, (IPB).
- Talley., W. K. (n.d.). *Port Economics. Routledge, First Edit.* New York.
- Triatmojo, B. (2009). *Perencanaan Pelabuhan. Beta Offset, Yogyakarta*.
- Ulfa, L. M. (2018). *Collaborative governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota DI Suarabaya. Doctoral Dessertation, Universitas Airlangga*.
- Willy, N. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Barru. Doctoral Dissertation*.



LAMPIRAN



Gambar 5 . Kondisi Infrastruktur, dan Aksesoris Pelabuhan





Gambar 6 . Wawancara dengan Informan

SURAT PENELITIAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sidiq Al-Mudiri No. 259 Telp. 846972 Fax. 0411/865888 Makassar 90221 E-mail: lpj@unismuh.ac.id



Nomor: 1204.05/C 4-VIII/VIII/41/2020
Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal: Permohonan Izin Penelitian

08 Muharram 1442 H
27 August 2020 M

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 896/USP A.1-VIII/VIII/42/2020 tanggal 26 Agustus 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: **JUM HARIANTO FATMAN**
No. Stambuk: **105641106616**
Fakultas: **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan: **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan: **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Collaborative Governance dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus 2020 s/d 29 Oktober 2020

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katirra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor: 5270/S.01/PTSP/2020
 Lampiran:
 Perihal: **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati Barru

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor 1204/05/C.4.VIII/VIII/41/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini

Nama: **JUM HARIANTO FATMAN**
 Nomor Pokok: 105641106616
 Program Studi: Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan Lembaga: Mahasiswa (STJ)
 Alamat: Jl. Sir Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/ Kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PELABUHAN ANDI MATTALATTA GARONGKONG KABUPATEN BARRU "

Yang akan dilaksanakan dari: **19 Agustus s/d 29 Oktober 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian

Demikian Surat Keterangan ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditertibkan di Makassar
 Pada tanggal 28 Agustus 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat: Pembina Tk I
 Np: 197105011989031004

Perihal: IZIN PENELITIAN
 Nomor: 5270/S.01/PTSP/2020
 Tanggal: 28 Agustus 2020



Jl. Bosongmelle No. 5, Telp: (0411) 4419711, Fax: (0411) 4489116
 Website: www.dpmptsp.sulawesi.go.id
 Makassar 90231





PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU
 Mal Pelayanan Publik Masjidi 11, Jln Iskandar Lela, Telp. (0127) 21662 Fax (0127) 21410
<http://zonaline.barru.ac.id> e-mail: barrupmpspk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 11 September 2020

Nomor : 577/D/DPMP/SPK/IX/2020
 Lampiran :
 Perihal : Izin Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth: 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru
 2. Kepala Dinas PI Kab. Barru
 3. Lurah Mangempang Kab. Barru
 di
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala DPA/PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5270/S/01/07/SP/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti Dosen Pegawai di bawah ini

Nama : JI M HARIANTO FATMAN
 Nomor Pokok : 105641106616
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Veteran Garongkong Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian Pengambilan Data di Wilayah Kantor Saudara yang berjangka mulai tanggal **14 September 2020** s.d **12 November 2020**, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul

"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PELABUHAN ANDIMATAKALAGARONGKONG KABUPATEN BARRU"

Sampai dengan saat ini belum ada data, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, Kepala Dinas PI Kabupaten Barru, dan Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan izin penelitian tersebut.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan dua rangkai, satu rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dan satu rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru.

Mengetahui dan menyetujui, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, Kepala Dinas PI Kabupaten Barru, dan Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan dua rangkai, satu rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dan satu rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, Kepala Dinas PI Kabupaten Barru, dan Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru.

di Kepala Dinas
 Kabud. Pengembangan Pelanggaran
 Penelitian

A
 A
 A

A
 A
 A

LEMBUSAN: 2 (dua) rangkai
 1 (satu) rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru
 1 (satu) rangkai untuk Kepala Dinas PI Kabupaten Barru
 1 (satu) rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru
 1 (satu) rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru
 1 (satu) rangkai untuk Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0150/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.
- MENINGGAT** : 1. Undang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar
- MEMPERHATIKAN** : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua** : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
- Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 11 Februari 2021 M



Dr. Hf. Inyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM 730727

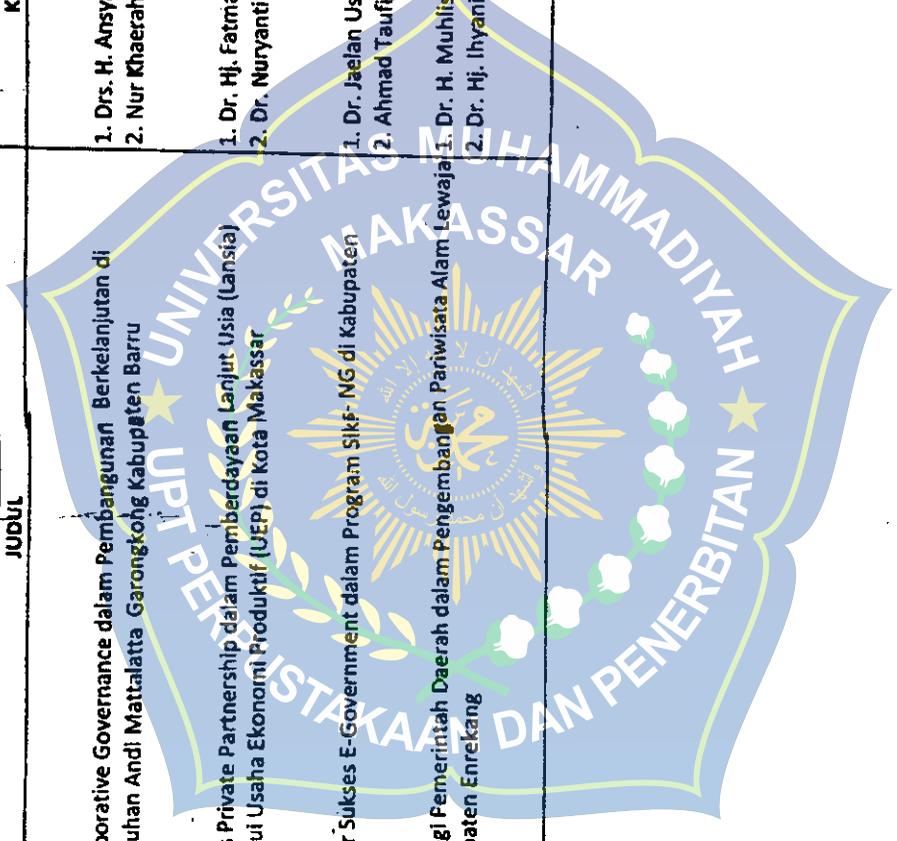
Tembusan :

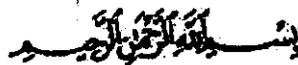
1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.

Keputusan Surat Keputusan:
 Nomor : 0150/FSP/A.3-VIII/II/42/2021
 Tanggal : 11 Februari 2021

**Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Sabtu, 13 Februari 2021, Jam : 13.30 - Selesai**

NO	STAMBUK TIM : IV	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11066 16	Jum Harianto Fatman	IP	Collaborative Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Nur Khaerah. S.Ip., M.IP	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si(Ketua) 2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2	10564 11128 16	Sri Wahyuni	IP	Publis Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si 2. Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si	3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3	10564 02035 14	Muhammad Nur	IP	Faktor Sukses E-Government dalam Program SIKF- MG di Kabupaten Gowa	1. Dr. Jaelan Usman, M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.Ip., M.IP	4. Nur Khaerah. S.Ip., M.IP
4	10564 1132 16	Surahman B	IP	Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja Kabupaten Enrekang	1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si 2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :
MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENINGGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua** : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
- Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumulahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 20 Februari 2021 M

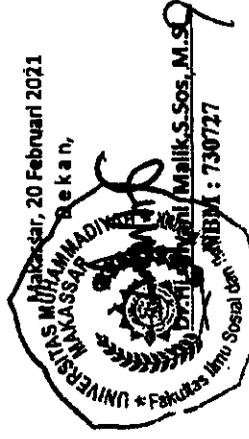


Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.

Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Selasa, 23 Februari 2021, Jam : 13.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11066 16 TM : 1	Aum Harianto Fatman	IP	Collaborative Governance dalam Pembangunan: Berkelanjutan di Pelabuan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Nur Khaerah. S.Ip., M.IP	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si(Ketua) 2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2	10564 11128 16	Sri Wahyuni	IP	Publis Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar	1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si 2. Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si	1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Soss., M.Si 2. Nur Khaerah. S.Ip., M.IP
3	10564 02035 14	Muhammad Niur	IP	Faktor sukses E-Government dalam Program Silks- NG di Kabupaten Gowa	1. Dr. Jaelan Usman, M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.Ip., M.IP	
4	10564 1132 16	Surahman B	IP	Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam Lewat Kabupaten Enrekang	1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si 2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Soss., M.Si	





**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Jum Harianto Fatman
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	15 %
2	Bab 2	2%	25 %
3	Bab 3	0%	15 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 Februari 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartaman, S.IP.,M.IP
NBM. 137 4895

**Mengetahui,
Ketua Prodi**

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si
NBM. 103 1102

RIWAYAT HIDUP



JUM HARIANTO FATMAN, lahir pada tanggal 22 November 1996 di Garongkong Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan Anak pertama dari dua Bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Abd. Rahman dan Hj. Fatmawati, S.Pd.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari Sekolah Dasar Inpres Garongkong Kabupaten Barru pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan di SMPN 1 Barru, Kabupaten Barru dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Barru Kabupaten Barru dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat SMA penulis langsung melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi strata satu Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis Pernah mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Pimpinan Komisariat FISIP Unismuh Makassar sampai Tingkatan Pimpinan Cabang IMM Barru, dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) dan pernah mendapat Piagam Perhargaan Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2016 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNISMUH Makassar pada tahun 2018 dengan 2019. Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul "*Collaborative*

Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.” Semoga dengan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari Universitas Muhammadiyah Makassar di masyarakat.

